

---

# Kepemimpinan Perempuan dalam Kebijakan Fiskal: Studi Sri Mulyani Indrawati dalam Perspektif WID, WAD, dan GAD

Canda Della Agustia Disy<sup>1</sup>, Salwa Adina Zafira<sup>2</sup>, Putri Salsadila<sup>3</sup>, Aniqotul Ummah<sup>4</sup>, Chomariyana Kartika Hesti<sup>5</sup>

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.482>

\*Correspondence: Canda Della Agustia

Disy

Email:

[2410413006@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413006@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 28-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 10-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati dalam kebijakan fiskal Indonesia melalui perspektif Women in Development (WID), Women and Development (WAD), dan Gender and Development (GAD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan data sekunder melalui studi dokumentasi serta penelusuran pustaka. Analisis dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Sri Mulyani mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan negara. Perspektif WID menunjukkan keberhasilan perempuan memasuki ruang kebijakan strategis, perspektif WAD menyoroti kontribusi kebijakan fiskal terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, sedangkan perspektif GAD menunjukkan upaya pembangunan responsif gender melalui gender responsive budgeting meskipun masih menghadapi hambatan struktural. Penelitian menyimpulkan bahwa representasi perempuan dalam posisi strategis penting bagi pembangunan inklusif, namun belum cukup menciptakan kesetaraan gender substantif tanpa perubahan struktur kebijakan dan relasi kekuasaan.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan Perempuan, Kebijakan Fiskal, Sri Mulyani Indrawati, WID, WAD, GAD

**Abstract:** This study aims to analyze Sri Mulyani Indrawati's leadership in Indonesia's fiscal policy through the perspectives of Women in Development (WID), Women and Development (WAD), and Gender and Development (GAD). This research employs a qualitative approach with a case study method using secondary data collected through document analysis and library research. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model. The findings show that Sri Mulyani's leadership represents increasing female participation in strategic state decision-making. From the WID perspective, her leadership reflects women's success in entering strategic policy spaces. From the WAD perspective, fiscal policies such as social assistance, subsidies, and economic support contribute to women's economic empowerment. Meanwhile, the GAD perspective indicates that the implementation of gender-responsive budgeting reflects efforts toward gender-responsive development, although structural obstacles remain. This study concludes that women's representation in strategic positions is important for inclusive development, but insufficient to achieve substantive gender equality without structural transformation in policy and power relations.

**Keywords:** Women's Leadership, Fiscal Policy, Sri Mulyani Indrawati, WID, WAD, GAD

---

## Pendahuluan

Isu kesetaraan gender dalam pembangunan hingga saat ini masih menjadi perhatian penting dalam kajian politik, ekonomi, dan kebijakan publik, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun berbagai indikator menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan gender, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai bentuk ketimpangan dalam kehidupan publik maupun domestik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan terciptanya keadilan gender secara substantif ([BPS, 2024](#)). Ketimpangan masih terlihat dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi ([UNDP, 2023](#)). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berlangsung belum sepenuhnya inklusif dan masih dipengaruhi oleh struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang setara dibandingkan laki-laki.

Laporan UN Women (2024) juga menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan masih menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk negara berkembang, sehingga diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam ruang publik dan pemerintahan.

Ketimpangan gender tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan budaya patriarki yang secara historis membentuk pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak masyarakat, perempuan seringkali ditempatkan dalam ranah domestik sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh keluarga, sedangkan laki-laki diposisikan sebagai aktor utama dalam ruang publik, termasuk dalam bidang ekonomi dan politik ([Oakley, 2016](#)). Pembagian peran yang bersifat sosial tersebut kemudian menghasilkan ketimpangan struktural yang mempengaruhi akses perempuan terhadap sumber daya, pendidikan, pekerjaan formal, serta posisi strategis dalam pemerintahan. Akibatnya, perempuan sering menghadapi hambatan ganda, yaitu keterbatasan akses dalam ruang publik sekaligus beban domestik yang tetap dilekatkan kepada mereka. Dalam konteks pembangunan, kondisi ini menyebabkan kontribusi perempuan dalam berbagai sektor belum dapat berkembang secara optimal meskipun partisipasi perempuan di ruang publik terus meningkat ([Moser, 1993](#)).

Dalam perkembangan kajian pembangunan, perempuan tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan gender menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh akses yang setara terhadap berbagai sumber daya pembangunan ([Cornwall, 2003](#)). [Kabeer \(2005\)](#) menjelaskan

---

---

bahwa pemberdayaan perempuan berkaitan dengan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya, kesempatan, serta kemampuan mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, pembangunan yang inklusif tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya mengurangi ketimpangan gender yang masih berlangsung dalam berbagai sektor kehidupan.

Dalam ranah kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal, perspektif gender seringkali belum menjadi pertimbangan utama dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Padahal, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional melalui instrumen seperti APBN, subsidi, perpajakan, bantuan sosial, dan distribusi anggaran negara ([Elson, 2004](#)). Kebijakan fiskal pada dasarnya tidak bersifat netral gender karena setiap kebijakan dapat memberikan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, terutama terhadap kelompok perempuan yang berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan sosial. Tanpa adanya pendekatan yang sensitif gender, kebijakan fiskal berpotensi memperkuat ketimpangan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, konsep gender responsive budgeting (GRB) menjadi penting sebagai upaya memastikan bahwa proses penganggaran negara mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan serta mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih adil ([Budlender & Hewitt, 2003](#)).

Perspektif gender dalam kebijakan publik merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan mampu mengurangi ketimpangan gender dalam berbagai sektor pembangunan. Salah satu konsep utama dalam pendekatan ini adalah gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender, yaitu strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses kebijakan publik. Menurut True (2003), pengarusutamaan gender berkembang sebagai strategi global untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mempertimbangkan dampaknya terhadap laki-laki dan perempuan secara setara. [Walby \(2005\)](#) juga menegaskan bahwa gender mainstreaming merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, pengarusutamaan gender telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional melalui berbagai regulasi pemerintah yang mendorong terciptanya kebijakan yang responsif gender. Implementasi pendekatan tersebut dalam kebijakan fiskal diwujudkan melalui penerapan gender responsive budgeting (GRB), yaitu mekanisme penyusunan anggaran yang mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan secara berbeda. Pengalaman Indonesia dalam menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi

---

instrumen penting untuk mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan ([Elson, 2004](#)).

Penelitian mengenai kebijakan fiskal dan kesetaraan gender sebelumnya telah banyak membahas implementasi gender responsive budgeting (GRB) serta pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik. [Siswiraningtyas dan Yuhertiana \(2021\)](#) menunjukkan bahwa implementasi anggaran responsif gender di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya komitmen institusi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman mengenai perspektif gender dalam proses penyusunan anggaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan berbasis gender di Indonesia masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan struktural dalam pembangunan.

Selain itu, penelitian [Muslem \(2024\)](#) mengenai transformasi kebijakan kesetaraan gender di Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam jabatan strategis dan menciptakan lingkungan institusi yang lebih inklusif. Sementara itu, penelitian mengenai Gender Perspective in Budget Planning pada penyusunan anggaran daerah di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses penganggaran masih bersifat terbatas dan simbolik, sehingga belum sepenuhnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai kebijakan fiskal berbasis gender masih banyak berfokus pada implementasi kebijakan dan pengarusutamaan gender secara institusional, sementara analisis mengenai kepemimpinan perempuan dalam kebijakan fiskal melalui perspektif WID, WAD, dan GAD masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menganalisis kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati dalam kebijakan fiskal melalui ketiga pendekatan tersebut.

Sementara itu, [Muslem \(2024\)](#) menemukan bahwa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati berkontribusi dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam jabatan strategis di Kementerian Keuangan serta menciptakan lingkungan institusi yang lebih inklusif. Di sisi lain, implementasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan, termasuk keterbatasan kapasitas institusi dan belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan pembangunan ([Walby, 2005](#)). Penelitian mengenai perspektif gender dalam perencanaan anggaran daerah juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses penganggaran masih cenderung bersifat simbolik dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan ([Khaerah & Mutiarin, 2017](#)).

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu gender dalam kebijakan publik masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dalam aspek implementasi kebijakan maupun partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian,

---

sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi gender responsive budgeting (GRB), pengarusutamaan gender, atau peningkatan representasi perempuan dalam birokrasi. Kajian yang secara khusus menganalisis kepemimpinan Sri Mulyani dalam kebijakan fiskal menggunakan perspektif *Women in Development (WID)*, *Women and Development (WAD)*, dan *Gender and Development (GAD)* secara komprehensif masih relatif terbatas. Padahal, ketiga perspektif tersebut penting untuk memahami tidak hanya aspek representasi perempuan dalam jabatan strategis, tetapi juga kontribusi kebijakan fiskal terhadap pemberdayaan perempuan serta perubahan struktur relasi gender dalam pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kepemimpinan Sri Mulyani dalam kebijakan fiskal Indonesia melalui perspektif WID, WAD, dan GAD.

Dalam konteks Indonesia, integrasi perspektif gender dalam kebijakan fiskal tidak dapat dilepaskan dari peran aktor yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Salah satu figur penting dalam konteks tersebut adalah Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu perempuan yang berhasil menduduki posisi strategis dalam pemerintahan Indonesia dan memiliki pengaruh besar dalam proses perumusan kebijakan ekonomi nasional. Kepemimpinannya dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat tata kelola keuangan negara, serta mendorong reformasi birokrasi dan kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap tantangan global ([Kementerian Keuangan RI, 2023](#)). Selain itu, keberadaan Sri Mulyani juga menjadi simbol meningkatnya partisipasi perempuan dalam struktur kekuasaan negara yang selama ini cenderung didominasi oleh laki-laki.

Namun demikian, kehadiran perempuan dalam posisi strategis pemerintahan tidak secara otomatis menjamin terciptanya kebijakan yang responsif gender. Representasi perempuan dalam jabatan publik seringkali masih berada pada tataran simbolik dan belum sepenuhnya mampu mengubah struktur kebijakan yang timpang ([Razavi & Miller, 1995](#)). Dalam banyak kasus, perempuan yang berada dalam struktur kekuasaan tetap bekerja dalam sistem ekonomi dan politik yang masih didominasi perspektif maskulin. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan belum tentu mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan atau mengurangi ketimpangan gender secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk melihat sejauh mana kepemimpinan perempuan dalam kebijakan fiskal mampu menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Women in Development (WID)*, *Women and Development (WAD)*, dan *Gender and Development (GAD)* sebagai kerangka analisis. Perkembangan ketiga pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap posisi perempuan dalam pembangunan, mulai dari fokus pada partisipasi perempuan hingga analisis yang lebih luas

---

terhadap relasi gender dan struktur kekuasaan. Pendekatan WID berfokus pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui perluasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang pengambilan keputusan (Rathgeber, 1990). Namun, pendekatan ini sering dikritik karena hanya menekankan aspek representasi tanpa menyentuh akar ketimpangan yang bersifat struktural. Sementara itu, pendekatan WAD melihat perempuan sebagai bagian integral dalam sistem ekonomi dan pembangunan sehingga perhatian tidak hanya diberikan pada partisipasi perempuan, tetapi juga pada posisi perempuan dalam struktur ekonomi yang lebih luas. Adapun pendekatan GAD menekankan analisis terhadap relasi gender dan struktur kekuasaan yang menciptakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (Moser, 1993). Dalam konteks kebijakan fiskal, pendekatan GAD digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan negara mampu menciptakan perubahan struktural yang mendorong kesetaraan gender secara substantif, bukan sekadar meningkatkan representasi perempuan dalam birokrasi pemerintahan

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati dalam kebijakan fiskal melalui perspektif WID, WAD, dan GAD. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepemimpinan perempuan, kebijakan fiskal, dan pembangunan berbasis gender, sekaligus menilai sejauh mana kebijakan fiskal yang dihasilkan telah mampu mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di Indonesia.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena kepemimpinan perempuan dalam kebijakan fiskal, khususnya yang dilakukan oleh Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap dinamika kebijakan publik, relasi gender, serta peran aktor dalam proses perumusan kebijakan fiskal. Sementara itu, metode studi kasus digunakan karena penelitian terpusat pada satu objek spesifik, yaitu kepemimpinan Sri Mulyani dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan fiskal di Indonesia melalui perspektif *Women in Development (WID)*, *Women and Development (WAD)*, dan *Gender and Development (GAD)*.

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga nasional dan internasional, serta publikasi akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta berbagai penelitian

---

terdahulu mengenai gender responsive budgeting (GRB), pengarusutamaan gender, dan kepemimpinan perempuan dalam kebijakan publik. Selain itu, media massa dan portal berita terpercaya juga digunakan sebagai sumber pendukung untuk melihat perkembangan kebijakan fiskal dan isu gender di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka (*library research*). Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, seperti nota keuangan APBN, laporan gender responsive budgeting (GRB), peraturan pemerintah, serta dokumen kebijakan lain yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Sementara itu, penelusuran pustaka dilakukan melalui Google Scholar, SINTA, dan berbagai portal jurnal akademik untuk memperoleh referensi yang membahas perspektif WID, WAD, dan GAD dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan berbasis gender.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan menyederhanakan data berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis dengan mengorganisasikan temuan berdasarkan perspektif WID, WAD, dan GAD sehingga hubungan antara kebijakan fiskal dan kesetaraan gender dapat dianalisis secara sistematis. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan data empiris yang ditemukan dengan kerangka teoritis penelitian guna memastikan validitas dan konsistensi hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### **Kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati dalam Kebijakan Fiskal Indonesia**

Sri Mulyani Indrawati merupakan salah satu figur perempuan yang berhasil menduduki posisi strategis dalam pemerintahan Indonesia sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Keberadaannya dalam struktur elite negara menjadi penting karena sektor pengelolaan keuangan dan kebijakan ekonomi selama ini cenderung didominasi oleh laki-laki. Dalam kepemimpinannya, Sri Mulyani memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, pengendalian subsidi, hingga penguatan program perlindungan sosial masyarakat ([Kementerian Keuangan RI, 2023](#)).

Kepemimpinan Sri Mulyani juga terlihat dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai reformasi administrasi perpajakan, digitalisasi sistem keuangan negara, serta penguatan efisiensi anggaran dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Dalam situasi

---

krisis, seperti dampak pandemi dan ketidakstabilan ekonomi internasional, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah melalui Kementerian Keuangan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Posisi Sri Mulyani dalam konteks ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mampu berada dalam ruang pengambilan keputusan, tetapi juga mampu memainkan peran penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi negara.

Di sisi lain, kepemimpinan Sri Mulyani juga berkaitan dengan upaya pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik melalui penerapan gender responsive budgeting (GRB). Konsep ini menekankan bahwa kebijakan anggaran negara seharusnya tidak dipandang netral gender, karena setiap kebijakan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan ([Budlender & Hewitt, 2003](#)). Kehadiran Sri Mulyani sebagai perempuan dalam posisi strategis turut memperlihatkan adanya peningkatan representasi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan negara. Namun demikian, representasi tersebut belum tentu secara otomatis menghasilkan kebijakan yang sepenuhnya responsif gender karena proses perumusan kebijakan tetap dipengaruhi oleh struktur ekonomi, politik, dan birokrasi yang lebih luas ([Miller, 1995](#)). Dengan demikian, kepemimpinan Sri Mulyani tidak hanya dapat dipahami sebagai simbol keberhasilan perempuan dalam birokrasi negara, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika relasi gender dalam kebijakan fiskal Indonesia.

### **Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif WID**

Pendekatan Women in Development (WID) menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan ([Rathgeber, 1990](#)). Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang selama bertahun-tahun lebih berorientasi pada laki-laki. Dalam konteks penelitian ini, kepemimpinan Sri Mulyani mencerminkan keberhasilan perempuan memasuki struktur kekuasaan negara yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh laki-laki, khususnya dalam bidang ekonomi dan kebijakan fiskal. Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan strategis dan berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.

Keberhasilan perempuan memasuki ruang pengambilan keputusan juga menunjukkan adanya perubahan dalam pola pembangunan yang sebelumnya kurang memberikan akses yang setara bagi perempuan. Menurut [Cornwall \(2016\)](#), peningkatan partisipasi perempuan dalam institusi publik merupakan langkah penting untuk memperluas representasi kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam proses pembangunan. Namun, representasi tersebut perlu diikuti oleh kemampuan untuk mempengaruhi proses kebijakan agar tidak berhenti pada aspek simbolik semata.

---

[Reeves dan Baden \(2000\)](#) menjelaskan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap kesempatan, tetapi juga pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. [Eagly dan Carli \(2007\)](#) menjelaskan bahwa perempuan yang berhasil mencapai posisi kepemimpinan strategis sering kali menghadapi berbagai hambatan struktural yang berbeda dibandingkan laki-laki, termasuk stereotip gender dan keterbatasan akses terhadap jaringan kekuasaan.

Keberadaan perempuan dalam posisi penting pemerintahan juga menunjukkan adanya perubahan dalam akses perempuan terhadap ruang publik dan pengambilan keputusan. Hal ini menjadi penting karena selama ini perempuan seringkali diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, bukan sebagai aktor utama dalam proses pembangunan itu sendiri. Dalam perspektif WID, keberhasilan Sri Mulyani menjadi simbol meningkatnya partisipasi perempuan dalam birokrasi negara sekaligus menunjukkan adanya peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk memasuki sektor strategis pemerintahan.

Namun demikian, pendekatan WID seringkali dikritik karena terlalu berfokus pada aspek representasi tanpa menyentuh akar ketimpangan yang bersifat struktural ([Moser, 1993](#)). Keterlibatan perempuan dalam jabatan publik belum tentu mampu mengubah relasi kekuasaan yang timpang apabila kebijakan yang dihasilkan masih menggunakan paradigma pembangunan yang tidak sensitif gender. Dalam konteks ini, keberhasilan Sri Mulyani menduduki posisi strategis belum secara otomatis menjamin terciptanya kebijakan fiskal yang sepenuhnya berpihak pada kebutuhan perempuan. Dengan demikian, perspektif WID dalam penelitian ini menunjukkan bahwa representasi perempuan merupakan langkah awal yang penting dalam pembangunan, tetapi belum cukup untuk menciptakan keadilan gender secara substantif tanpa adanya perubahan dalam struktur kebijakan dan sistem sosial yang lebih luas.

### **Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif WAD**

Pendekatan Women and Development (WAD) memandang perempuan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi dan pembangunan ([Rathgeber, 1990](#)). Berbeda dengan pendekatan WID yang berfokus pada keterlibatan perempuan, WAD lebih menekankan bagaimana perempuan terlibat dalam proses produksi dan bagaimana pembangunan ekonomi mempengaruhi kehidupan perempuan secara langsung. Dalam konteks kebijakan fiskal Indonesia, berbagai kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial, subsidi, dukungan terhadap UMKM, dan program perlindungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi perempuan, khususnya perempuan yang bekerja di sektor informal dan rumah tangga rentan ([Budlender & Hewitt, 2003](#)).

---

[Chant \(2006\)](#) menyoroti bahwa perempuan sering kali menjadi penopang utama kesejahteraan rumah tangga, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Karena itu, kebijakan fiskal yang mendukung perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi memiliki arti penting dalam memperkuat posisi ekonomi perempuan.

Kebijakan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah melalui instrumen fiskal pada dasarnya memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Dalam banyak keluarga, perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan ekonomi domestik sehingga bantuan sosial, subsidi pangan, maupun dukungan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi stabilitas kehidupan perempuan. Selain itu, program dukungan terhadap UMKM juga membuka peluang ekonomi bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas produktif dan meningkatkan pendapatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki hubungan langsung dengan posisi perempuan dalam sistem pembangunan ekonomi nasional.

Dari perspektif pembangunan, perempuan tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam aktivitas produksi dan reproduksi sosial. [Kabeer \(2005\)](#) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan berkaitan dengan kemampuan perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan, dan memperluas peluang ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat posisi ekonomi perempuan dalam masyarakat.

Meskipun demikian, pendekatan WAD juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi seringkali tetap berjalan dalam struktur yang belum setara gender. Perempuan masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, ketimpangan pendapatan, rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi, serta beban ganda antara pekerjaan domestik dan pekerjaan publik ([Alberdi, 2008](#)). Dengan demikian, meskipun kebijakan fiskal memberikan manfaat ekonomi bagi perempuan, sistem pembangunan yang ada masih berpotensi mereproduksi ketimpangan gender dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan belum sepenuhnya berada dalam posisi yang setara dalam proses pembangunan, sehingga kebijakan ekonomi yang ada masih perlu diarahkan pada perubahan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

### **Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif GAD**

Pendekatan Gender and Development (GAD) menekankan pentingnya melihat ketimpangan gender sebagai bagian dari relasi sosial dan struktur kekuasaan yang lebih luas ([Moser, 1993](#)). Berbeda dengan WID dan WAD, pendekatan GAD tidak hanya berfokus pada perempuan sebagai kelompok yang perlu dilibatkan atau diberdayakan, tetapi juga

---

menyoroti bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh sistem sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks kebijakan fiskal, pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan negara mampu menciptakan perubahan struktural yang mendukung terciptanya kesetaraan gender secara substantif.

Dalam perspektif GAD, ketimpangan gender dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas sehingga upaya mencapai kesetaraan gender tidak cukup hanya melalui program yang ditujukan kepada perempuan. [Walby \(2005\)](#) menekankan bahwa ketimpangan gender berkaitan dengan berbagai institusi sosial, ekonomi, dan politik yang saling berhubungan. Oleh karena itu, perubahan menuju pembangunan yang responsif gender memerlukan transformasi pada tingkat kebijakan sekaligus perubahan dalam struktur sosial yang menopang ketidaksetaraan tersebut.

Menurut [Parpart \(2002\)](#), pendekatan pembangunan berbasis gender perlu diarahkan pada perubahan relasi kekuasaan yang menyebabkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya partisipasi perempuan, tetapi juga dari perubahan struktur sosial yang lebih setara.

Salah satu bentuk implementasi pendekatan ini terlihat melalui penerapan gender responsive budgeting (GRB), yaitu penyusunan anggaran negara yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara berbeda ([Budlender & Hewitt, 2003](#)). Melalui GRB, kebijakan fiskal diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam distribusi anggaran negara. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal tidak lagi dipahami sebagai instrumen ekonomi yang netral, melainkan sebagai instrumen politik yang memiliki pengaruh terhadap relasi gender dalam masyarakat.

Namun demikian, implementasi GRB di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian [Siswiraningtyas dan Yuhertiana \(2021\)](#) menunjukkan bahwa pengintegrasian perspektif gender dalam kebijakan anggaran masih terkendala oleh rendahnya pemahaman institusi terhadap isu gender, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kecenderungan implementasi yang masih bersifat administratif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang secara formal telah mengadopsi perspektif gender belum tentu mampu menghasilkan perubahan struktural dalam praktiknya.

Pendekatan serupa juga dikemukakan oleh [True \(2012\)](#) yang menyatakan bahwa kebijakan publik perlu mempertimbangkan berbagai bentuk ketimpangan yang saling beririsan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks kebijakan fiskal, hal ini berarti bahwa penyusunan anggaran tidak hanya memperhatikan perbedaan gender, tetapi juga faktor lain seperti kelas sosial, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang dapat mempengaruhi dampak kebijakan terhadap perempuan.

---

Dalam konteks tersebut, keberadaan Sri Mulyani sebagai perempuan dalam posisi strategis memang menunjukkan adanya kemajuan dalam representasi gender di pemerintahan. Namun, pendekatan GAD menekankan bahwa kesetaraan gender tidak cukup dicapai melalui keterwakilan perempuan semata. Kesetaraan gender membutuhkan transformasi dalam sistem kebijakan, pola pembangunan, serta relasi kekuasaan yang selama ini menghasilkan ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pembangunan yang responsif gender tidak hanya bergantung pada siapa yang memimpin kebijakan, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah struktur sosial yang tidak setara.

### Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati dalam kebijakan fiskal menunjukkan adanya peningkatan representasi perempuan dalam struktur pemerintahan sekaligus upaya integrasi perspektif gender dalam kebijakan publik melalui gender responsive budgeting. Kehadiran Sri Mulyani dalam posisi strategis menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk berperan dalam sektor ekonomi dan pengambilan keputusan yang selama ini lebih didominasi laki-laki.

Dalam perspektif WID, kepemimpinan Sri Mulyani merepresentasikan keberhasilan perempuan memasuki ruang pengambilan keputusan strategis negara. Dalam perspektif WAD, kebijakan fiskal menunjukkan adanya kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui bantuan sosial, subsidi, dan dukungan ekonomi masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif GAD, kebijakan fiskal telah memperlihatkan adanya upaya menuju pembangunan yang lebih responsif gender melalui penerapan GRB, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam birokrasi dan sistem kebijakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian [Muslem \(2024\)](#) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam posisi strategis di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Siswiraningtyas dan Yuhertiana (2021) yang menyatakan bahwa implementasi gender responsive budgeting (GRB) di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan kelembagaan dan struktural. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menganalisis kepemimpinan Sri Mulyani melalui perspektif *Women in Development (WID)*, *Women and Development (WAD)*, dan *Gender and Development (GAD)* secara terpadu. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara representasi perempuan dalam jabatan strategis, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan upaya transformasi relasi gender dalam pembangunan.

[Rai \(2008\)](#) menjelaskan bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan publik membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat agar tujuan kesetaraan gender tidak berhenti pada tingkat regulasi. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan penerapan gender responsive budgeting masih sangat bergantung pada komitmen institusi dan implementasi kebijakan di tingkat birokrasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam posisi strategis merupakan langkah penting dalam pembangunan inklusif, tetapi belum sepenuhnya menjamin terciptanya kesetaraan gender yang substantif. Transformasi menuju pembangunan yang benar-benar responsif gender memerlukan perubahan yang lebih mendalam dalam struktur kebijakan, relasi kekuasaan, serta paradigma pembangunan yang selama ini masih menyisakan ketimpangan gender dalam berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati dalam kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan adanya kemajuan dalam representasi perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati dalam kebijakan fiskal Indonesia mencerminkan kemajuan representasi perempuan dalam posisi strategis pemerintahan sekaligus memperlihatkan upaya integrasi perspektif gender melalui penerapan gender responsive budgeting. Dalam perspektif WID, kepemimpinan Sri Mulyani menunjukkan keberhasilan perempuan memasuki ruang pengambilan keputusan strategis negara; dalam perspektif WAD, kebijakan fiskal memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai program perlindungan sosial dan dukungan ekonomi; sedangkan dalam perspektif GAD, kebijakan fiskal telah mengarah pada pembangunan yang lebih responsif gender meskipun masih menghadapi hambatan struktural. Temuan ini mengimplikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis penting untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif, namun belum cukup untuk mewujudkan kesetaraan gender substantif tanpa transformasi pada struktur kebijakan dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan dan anggaran responsif gender secara lebih substantif, sementara penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak kebijakan fiskal terhadap kelompok perempuan pada sektor ekonomi tertentu melalui pendekatan empiris yang lebih mendalam.

### **Daftar Pustaka**

- Alberdi, I. (2008). *The position of women in development*. Universidad Complutense de Madrid.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks pembangunan gender Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.

- 
- Budlender, D., & Hewitt, G. (2003). Gender budgets make more cents: Country studies and good practice. Commonwealth Secretariat.
- Chant, S. (2006). Re-thinking the feminization of poverty in relation to aggregate gender indices. *Journal of Human Development*, 7(2), 201–220. <https://doi.org/10.1080/14649880600768538>
- Cornwall, A. (2003). Whose voices? Whose choices? Reflections on gender and participatory development. *World Development*, 31(8), 1325–1342. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00086-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00086-X)
- Cornwall, A. (2016). Women's empowerment: What works? *Journal of International Development*, 28(3), 342–359. <https://doi.org/10.1002/jid.3210>
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). *Through the labyrinth: The truth about how women become leaders*. Harvard Business School Press.
- Elson, D. (2004). Gender responsive budget initiatives: Some key dimensions and practical examples. UNIFEM.
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. *Gender & Development*, 13(1), 13–24. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Miller, C. (1995). *Women and development: Theoretical perspectives*. Zed Books.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.
- Muslem, M. (2024). Transformasi kebijakan kesetaraan gender dalam pengembangan SDM Kementerian Keuangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58.
- Oakley, A. (2016). *Sex, gender and society*. Routledge.
- Parpart, J. L. (2002). Rethinking empowerment, gender and development: An introduction. In J. L. Parpart, S. M. Rai, & K. Staudt (Eds.), *Rethinking empowerment: Gender and development in a global/local world* (pp. 3–21). Routledge.
- Rai, S. M. (2008). *The gender politics of development*. Zed Books.
- Rathgeber, E. M. (1990). WID, WAD, GAD: Trends in research and practice. *The Journal of Developing Areas*, 24(4), 489–502.
- Razavi, S., & Miller, C. (1995). *From WID to GAD: Conceptual shifts in the women and development discourse*. United Nations Research Institute for Social Development.
- Reeves, H., & Baden, S. (2000). *Gender and development: Concepts and definitions*. Institute of Development Studies.
-

- 
- Siswiraningtyas, D., & Yuhertiana, I. (2021). Implementation gender-responsive budget: The constraints and their coping strategies. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(2), 120–134. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.120-134>
- True, J. (2012). *The political economy of violence against women*. Oxford University Press.
- UN Women. (2024). *Women in politics: 2024*. UN Women.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human development report 2023*. United Nations Development Programme.
- Walby, S. (2005). Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 12(3), 321–343. <https://doi.org/10.1093/sp/jxi018>.